

**MENGKRITISI DINAMIKA KOLONISASI DAN TRANSMIGRASI  
DI TOMONI/MANGKUTANA, LUWU TIMUR (1937-1985)**  
*(CRITICIZING THE DYNAMICS OF COLONIZATION AND  
TRANSMIGRATION IN TOMONI/MANGKUTANA, EAST LUWU, 1937-1985)*

**Sahajuddin**  
**Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan**  
**Jalan Sultan Alauddin/ Tala Salapang Km. 7 Makassar, 90221**  
**Telepon (0411) 885119, 883748, Faksimile (0411) 865166**  
**Pos-el: [saj.sahajuddin@yahoo.com](mailto:saj.sahajuddin@yahoo.com)**  
**Handphone: 081342630331**

Naskah diterima tanggal 04-09-2019. Naskah direvisi tanggal 04-11-2019. Naskah disetujui tanggal 05-11-2019

**ABSTRACT**

*The research revealed and described the importance of the implementation of migration policy, in particular, the problem of colonization during the Dutch East Indies and the problem of transmigration during the pre-independence of Indonesian by looking at the case of its placement in Tomoni, East Luwu. The method used was the historical method that explained the problem based on the historical perspective. The result showed that the implementation of colonization and transmigration policy has differences and similarities in the goals and targets aspects that were gained, namely between the mobilization of labor and the distribution of the population. The implementation of this policy considered the failure, due to the goal was not achieved with a large budget. However, some people judge succeed. Then, the placement of colonists and transmigrations in Mangkutana/Tomoni was quite successful, after there was a stimulus in the form of local and national initiative migration. In South Sulawesi culturally, it also functioned as one of the factors which stimulated the success due to migration became culture and behavior that was often done by the people in the archipelago of South Sulawesi since the XVII century to the independence period.*

**Keywords:** *dynamics, colonization, transmigration, Tomoni, and initiative.*

**ABSTRAK**

Kajian ini mengungkapkan dan menjelaskan tentang penting tidaknya pelaksanaan kebijakan migrasi, khususnya masalah kolonisasi pada masa Hindia Belanda dan masalah transmigrasi pada pascakemerdekaan Indonesia dengan melihat kasus penempatannya di Tomoni, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang menjelaskan persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kolonisasi dan transmigrasi memiliki perbedaan dan persamaan dari segi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu antara pengerahan tenaga kerja dan pemerataan penduduk. Kebijakan itu dalam pelaksanaannya ada yang menganggap gagal karena tujuan kurang tercapai dengan beban anggaran yang besar, tetapi juga ada yang menilai berhasil. Namun, penempatan kolonis dan transmigran di Mangkutana/Tomoni terbilang berhasil setelah ada stimulasi dengan adanya migrasi swakarsa lokal dan nasional. Secara kultural di Sulawesi Selatan, juga berfungsi sebagai salah satu faktor yang menstimulus keberhasilan itu karena migrasi menjadi budaya dan perilaku yang kerap dilakukan oleh orang-orang Sulawesi Selatan di nusantara sejak abad XVII dan berlangsung hingga masa kemerdekaan.

**Kata Kunci:** Dinamika, kolonisasi, transmigrasi, Tomoni dan Swakarsa

## PENDAHULUAN

Mangkutana dan Tomoni merupakan daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur adalah hasil pemekaran Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003, sementara Kabupaten Luwu Utara adalah hasil pemekaran Kabupaten Luwu pada tahun 1999. Kecamatan Mangkutana sudah ada pada masa terbentuknya Kabupaten Luwu sejak tahun 1959, sedang Kecamatan Tomoni belum ada pada masa itu. Kecamatan Tomoni baru terbentuk pada saat pemekaran wilayah Kabupaten Luwu sebagai bagian dan sebagai hasil dari pemekaran Kecamatan Mangkutana, dimana Kecamatan Tomoni masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara tetapi masih berstatus kecamatan pembantu atau kecamatan persiapan. Namun, setelah terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, status kecamatan pembantu Tomoni dinaikkan statusnya menjadi Kecamatan Tomoni dan bahkan dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Tomoni Timur.

Sejak tahun 1937, Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan kebijakan kolonisasi dengan menjadikan Mangkutana sebagai salah satu wilayah penempatan, khususnya di Lembah Kalaena dan sekitar Sungai Tomoni (Sjamsu, 1959: 60-67). Namun, baru terealisasi pada tahun 1938-1939 menurut pengakuan para kolonis pada masa itu (Kasirun, wawancara 05 Maret 2018). Kemudian pada masa kemerdekaan, daerah ini (Mangkutana) juga dijadikan sebagai wilayah penempatan transmigrasi oleh pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1973 dan 1980-an, dan baru terealisasi pada tahun 1974 dan 1975 menurut pengakuan salah seorang transmigran lokal di Mangkutana (Eka Candra, wawancara 03 Februari 2018). Sehingga mangkutana dan Tomoni tidak dapat terpisahkan jika kita mengacu pada saat pelaksanaan kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda (1937) dan

pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah Republik Indonesia (1973).

Kolonisasi dan transmigrasi selalu disamakan dari segi pelaksanaannya karena masing-masing merasa melakukan pemerataan penduduk dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya. Namun, sesungguhnya memiliki banyak perbedaan dalam banyak hal. Tetapi hal itu yang kami anggap sebagai bagian dari dinamika migrasi (kolonisasi dan transmigrasi) di daerah penempatan, seperti yang terjadi Tomoni. Kolonisasi dan transmigrasi sebagai bentuk migrasi yang mengalami dinamika, baik dari segi istilah katanya, pemaknaannya, tujuannya, maupun nilai-nilai implementasinya dalam masyarakat. Kajian ini lebih banyak menyoroti dari segi pelaksanaan kolonisasi dan transmigrasi.

Masalah migrasi di Indonesia, bukanlah sikap atau tindakan pilihan yang baru dilakukan oleh orang-orang Indonesia, melainkan sudah lama terjadi, bahkan semua belahan dunia melakukannya dengan berbagai macam istilah. Di Indonesia saja, sejak zaman kerajaan yang ada di nusantara (Indonesia) dan bahkan jauh sebelum masa kerajaan. Walaupun memang yang dapat terlacak baru banyak terjadi pada masa kerajaan. Sementara batasan migrasi yang dimaksud di sini adalah migrasi yang dipahami oleh banyak orang, yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah tertentu ke wilayah lain, migrasi itu memiliki makna yang sangat luas. Tetapi jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu migrasi internasional seperti imigrasi dan emigrasi serta turunannya. Kedua adalah migrasi nasional seperti urbanisasi, transmigrasi dan ada lagi istilah lain yang hampir sama dengan transmigrasi yang pernah dilakukan di Indonesia adalah kolonisasi pada masa Hindia Belanda. Sementara, dalam kajian ini yang dibahas adalah hanya kolonisasi, transmigrasi, dan migrasi nasional, khususnya migrasi swakarsa nasional dan swakarsa lokal. Migrasi swakarsa lokal yang dimaksud di

sini adalah perpindahan penduduk antarkabupaten dalam suatu provinsi, yaitu melakukan perpindahan (transmigrasi) atas keinginan dan prakarsa sendiri dalam wilayah provinsi yang sama (Depdikbud.1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, hlm.983).

Usaha-usaha pemindahan penduduk secara berencana dan terorganisir, sebenarnya telah dimulai pada awal abad XX semasa jaman penjajahan Belanda yang terkenal dengan istilah kolonisasi. Kolonisasi pertama dilakukan pada tahun 1905 dari Jawa ke Lampung, termasuk penempatan kolonisasi di Mangkutana dan Tomoni pada tahun 1938. Namun, alasan dan cara pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan jiwa, cita-cita, dan kepribadian bangsa Indonesia yang merdeka. Sebab pada masa itu, tujuan pemerintah Hindia Belanda melakukan kolonisasi tidak semata-mata mensejahterakan rakyat yang dikolonisasi tetapi lebih kepada pemenuhan tenaga kerja yang murah di berbagai perkebunan swasta sebagai afiliasi pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan itu dilakukan, juga karena adanya kritikan dan desakan dunia luar tentang sistem penjajahan Belanda yang tidak memperhatikan kesejahteraan tanah jajahannya. Jawaban dari kritikan dan desakan dunia itulah yang melahirkan "Politik Etis 1901" melalui edukasi (pendidikan), irigasi, dan imigrasi.

Politik etis dianggap sebagai politik balas budi, dari negara penjajah ke negara terjajah, tetapi dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan tujuan utama pemerintah Hindia Belanda. Tetapi harus diakui bahwa politik kolonial Belanda itu memiliki dampak positif dalam jangka waktu panjang, kebijakan itu dapat menguntungkan Indonesia. Kebanyakan kolonisasi yang terjadi di dunia adalah motif ekonomi (Sjamsu, 1959:62), tetapi alasan pemerintah kolonial juga sangat logis bahwa kepadatan penduduk Pulau Jawa, Madura, dan Bali berdasarkan data statistik tahun 1983 menyebutkan 60% penduduk

Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dan hanya menempati 7% dari luas wilayah Indonesia (Ismawan, 1985: 129).

Setelah Indonesia merdeka, sistem kolonisasi pada masa penjajahan Belanda perlu mengadopsi sistem itu dengan tujuan yang berbeda yang dikenal dengan istilah transmigrasi. Tujuan transmigrasi mencakup beberapa hal sebagaimana pidato Soekarno di muka MPR pada 16 Agustus 1975 (Rukmadi Warsito, dkk., 1984:vii). bahwa transmigrasi perlu dilakukan untuk menjawab kepincangan masalah kependudukan dan pengembangan/pembangunan wilayah dari Saban sampai Merauke. Dalam pada itu telah ditetapkan peraturan perundangan transmigrasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi sampai dibuatkan undang-undang, yaitu UU No. 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, termasuk UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Bagian penjelasan UU No. 3 Tahun 1972 menyebutkan bahwa masyarakat daerah transmigrasi merupakan masyarakat yang masih dalam proses pembentukan, perlu adanya pembinaan khususnya selama kurang lebih lima tahun. Pembinaan tersebut dilaksanakan secara bertahap yang meliputi: tahap penempatan, antara lain pemberian jaminan hidup, kesehatan, dan pendidikan pada tingkat permulaan; tahap pengembangan tanah dijuruskan ke arah usaha tani yang modern/komersil; dan tahap pembangunan masyarakat desa transmigrasi diselaraskan dengan pola pembangunan masyarakat desa.

Kajian ini dianggap penting untuk menjawab adanya dinamika dalam masyarakat penempatan kolonisasi dan transmigrasi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Tomoni. Hal ini dianggap menarik sebab selama pelaksanaan kolonisasi dan transmigrasi, sering mendapat kritikan dari berbagai pihak, terkait dengan berhasil tidaknya program ini. Memang sudah banyak hasil kajian kolonisasi dan transmigrasi

sebagaimana yang ditampilkan di daftar pustaka yang lebih banyak mempersoalkan adaptasi dan pola-pola, termasuk hal-hal lain yang saling melengkapi. Dari sekian data yang diperoleh tersebut, tidak satupun yang mengkaji kolonisasi dan transmigrasi yang ada di Tomoni. Sehingga kajian ini dianggap penting dengan berusaha menjelaskan dan menguraikan dinamika penempatan kolonisasi dan transmigrasi di Tomoni. Untuk mendapatkan penjelasan tersebut, berturut-turut akan menguraikan tentang arus migrasi Sulawesi selatan, polemik pelaksanaan dan penempatan kolonisasi dan transmigrasi.

## METODE

Kajian ini mempergunakan metode studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah pada umumnya (Cottschalk, 1985:27) adalah sebagai berikut: heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan data-data atau sumber-sumber yang berkaitan dengan kolonisasi dan transmigrasi, baik studi pustaka maupun sejarah lisan (wawancara); kritik sumber, artinya bahwa tidak semua sumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh itu akan dipergunakan sebagai kebenaran analisis tetapi diseleksi melalui kritik; interpretasi, sering disebut penafsiran sejarawan terhadap sumber-sumber yang diperoleh; interpretasi penulis dalam kajian ini, lebih kepada penjelasan dan analisa sumber yang dipakai oleh penulis; dan historiografi, sering diartikan sejarah penulisan sejarah secara luas. Maksudnya sebagai suatu kesatuan dari proses rekonstruksi yang kita sebut historiografi (Kartodirdjo, 1985: 9). Melalui metode tersebut, diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan dinamika pelaksanaan kolonisasi dan transmigrasi di Indonesia dan khususnya di Tomoni, Sulawesi Selatan.

## PEMBAHASAN

### Arus Migrasi Sulawesi Selatan

Migrasi di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru karena sudah ada sebelum Hindia Belanda dan sebelum pemerintahan Republik Indonesia. Migrasi yang terjadi pada masa lampau sudah terjadi jauh sebelum terbentuknya kerajaan dengan istilah kehidupan berpindah-pindah. Kemudian berkembang menjadi kehidupan menetap pada suatu wilayah permukiman tertentu. Adanya kehidupan yang menetap itu merupakan salah satu wujud dari migrasi. Peristiwa atau sejarah umat manusia dengan kehidupan menetapnya adalah peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Sulawesi Selatan sendiri. Khusus di daerah Sulawesi Selatan telah banyak ditemukan bukti-bukti itu, seperti di Maros, Soppeng, Luwu, dan daerah-daerah lainnya (baca Hasanuddin dkk.,2005).

Migrasi di Indonesia terus berlangsung dari waktu ke waktu, tetapi migrasi semakin tampak pada masa kerajaan. Migrasi Sulawesi Selatan pada masa kerajaan ini, terjadi pada abad XVII. Banyak penduduk kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan melakukan migrasi, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Pascaperang Makassar (1666-1669), kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam sekutu Kerajaan Gowa-Tallo mengalami kekalahan dan dipaksa menandatangani Perjanjian Bungaya oleh pihak VOC bersama sekutunya pada tahun 1667 (Poelinggomang, dkk., 2004: 123-130).

Kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo, ditambah dengan tekanan dari isi Perjanjian Bungaya yang sangat memberatkan itu, yang menyebabkan banyak orang Sulawesi Selatan melakukan migrasi ke berbagai daerah di Indonesia. Alasan terjadinya migrasi pada masa itu karena tidak mau dikuasai oleh Belanda (VOC); Ada yang melakukan migrasi karena mereka tidak mau menerima isi Perjanjian Bungaya yang sangat merugikan; selain itu, ada polarisasi

kelompok yang masih ingin melakukan perlawanan kepada kolonial (VOC), yaitu mereka yang kecewa atas kekalahan Kerajaan Gowa. Kelompok ini masih tetap berusaha melanjutkan perlawanan di kerajaan-kerajaan lain atas penaklukan dan hegemoni VOC pada masa itu. Akibatnya, mereka melakukan migrasi dan di sanalah mereka melakukan perlawanan; banyak juga yang beralasan melakukan migrasi karena alasan keamanan di Sulawesi Selatan yang sangat membahayakan pada masa itu sehingga harus merantau alias migrasi.

Migrasi orang Sulawesi Selatan ini menyebar ke seluruh nusantara, ada yang ke Jawa membantu perjuangan Trunojoyo yang ada di Madura, Jawa Timur, termasuk ke Kerajaan Mataram. Bahkan di sana, mereka melakukan kawin-mawin, sebut saja Karaeng Galesong. Di Banten ada kelompok rombongan Syeh Yusuf yang juga melakukan kawin-mawin di sana (Kartodirdjo, 1988: 106-115). Di Sumatera dan Melayu kita mengenal tujuh Daeng yang melakukan migrasi ke sana, dan tujuh Daeng ini sangat berperan dalam sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, termasuk di Pulau Kalimantan, di Nusa Tenggara, dan sampai ke Maluku, serta Papua. Migrasi orang Sulawesi Selatan ke berbagai wilayah di nusantara berlanjut terus dari waktu ke waktu, termasuk pada masa pra dan pascakemerdekaan. Migrasi pascaawal kemerdekaan tidak tidak jauh berbeda pada abad XVII, tetapi pada masa DI/TII lebih banyak masalah keamanan.

Migrasi orang-orang Sulawesi Selatan diperkuat juga dengan data-data yang menyebutkan bahwa migrasi penduduk Sulawesi Selatan menyebar hampir merata ke berbagai Pulau besar yang ada di nusantara, mulai ke Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta Pulau Sulawesi pada umumnya. Hasil kajian Siswono Yudohusodo (1997) menyebutkan bahwa migrasi orang Sulawesi Selatan cukup merata, ke Pulau

Jawa diperkirakan ada sekitar 29,31%; ke Sumatera ada sekitar 12,9%; ke Kalimantan ada sekitar 32,25%; dan ke Pulau lainnya ada sekitar 26,35%. Migrasi orang Sulawesi ini, khususnya Sulawesi Selatan dianggap migrasi yang ideal pemerataannya atau persebarannya jika dibandingkan dengan migrasi daerah-daerah lain di Nusantara. Misalnya dengan migrasi orang Jawa dianggap tidak ideal pemerataannya karena lebih banyak ke Sumatera yang mencapai 75% dan sisanya dibagi ke daerah lain, demikian juga migrasi orang Sumatera lebih banyak ke Jawa yang mencapai 90,13% dan sisanya terbagi ke daerah lain di Indonesia (Yudohusodo. 1997: 14).

Migrasi orang Sulawesi Selatan itu cukup banyak dan hasilnya dianggap berhasil baik, karena dapat menyatu dengan masyarakat dan penduduk setempat (penduduk asli atau penduduk yang telah menetap sebelumnya). Secara tradisi, memang migrasi orang Sulawesi Selatan menjunjung tinggi pepatah yang mengatakan bahwa “di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung”. Artinya, bahwa orang Sulawesi Selatan yang melakukan migrasi secara totalitas (Andi Nazaruddin, wawancara, Minggu 04 Maret 2018 dalam Focus Groep Discussion/FGD) terutama bagi mereka yang melakukan migrasi karena alasan ekonomi. Sebagian besar dari mereka akan menjadi penduduk dan warga di wilayah yang mereka tempati dan bahkan melakukan kawin-mawin. Jangankan yang melakukan migrasi, mereka pun yang pergi menuntut ilmu atau menjadi tenaga kerja di daerah lain banyak yang menetap menjadi warga, apa lagi jika sudah mendapat pasangan hidup di daerah tersebut.

Beberapa informan menuturkan bahwa mereka melakukan migrasi secara totalitas karena mereka menjual sebagian besar, bahkan ada di antara mereka menjual semua lahannya di kampung, kemudian pindah di daerah yang baru. Setelah sampai di daerah yang baru, uang hasil penjualan rumah dan tanahnya,

mereka pakai membeli tanah kembali sebagai lahan pertanian dan lahan tempat tinggal, sisanya dipakai menjadi modal usaha. Kasus seperti inilah yang mereka istilahkan migrasi totalitas. Mereka bercerita bahwa harga tanah dikampungnya lebih mahal, bahkan sampai lima kali lipat dibanding dengan harga tanah di daerah tempat barunya, sehingga menjual tanah di kampungnya 1 hektar, ia bisa membeli 3 sampai 5 hektar di daerah barunya (Andi Nazaruddin, wawancara, Minggu 04 Maret 2018 dalam Focus Group Discussion/FGD). Informan ini, adalah migrasi swakarsa lokal di Kecamatan Tomoni yang berasal dari Bugis Sidrap, Wajo, dan Soppeng sejak tahun 1975. Pernyataan ini yang memperkuat hasil kajian Siswono Yudohusodo bahwa penduduk Sulawesi betul-betul menerapkan migrasi dengan somboyan “di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak”.

Migrasi swakarsa lokal di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan yang sangat besar karena ada beberapa faktor pendorong, khususnya nilai-nilai kultural yang sudah ada sejak zaman lampau. Orang-orang Sulawesi Selatan secara kultural terkenal sebagai pelaut yang ulung dan tentu saja sangat erat kaitannya dengan jiwa merantau. Faktor budaya lain yang sangat kental di Sulawesi Selatan adalah budaya yang berkaitan dengan status sosial yang dikenal dengan golongan bangsawan, golongan *tosama/tu(to) maradeka*, dan golongan ketiga adalah *ata/joa*. Golongan bangsawan adalah golongan yang memegang peran penting dalam kekuasaan politik, dan dalam kepemilikan sumber-sumber ekonomi, dan *ata* atau *joa*. *Ata* atau *joa* selalu disamakan dengan hamba sahaya atau harta, tetapi sekarang golongan itu sudah tidak ada atau berubah, lebih tepat disebut pengikut atau klien sebagaimana diistilahkan oleh Heddy Shri Ahimsa Putra dalam bukunya *Minawang* (Ahimsa. 1988: 88-159).

Salah satu nilai yang terkandung dalam konsep budaya tersebut adalah rasa malu yang mendalam (*siri*). Misalnya

golongan bangsawan sangat malu jika kerja kasar dalam komunitasnya karena yang mestinya yang bekerja kasar itu adalah golongan *ata/joa* dan juga golongan *tomaradeka*. Lebih memalukan lagi jika golongan bangsawan dan *tomaradeka* menjadi miskin secara ekonomi, apa lagi jika mereka lebih miskin dari golongan yang ada di bawahnya. Untuk mempertahankan status dan tetap dihormati di komunitasnya, mereka harus tetap kaya secara ekonomi menurut ukuran komunitasnya. Ada beberapa cara yang boleh ditempuh untuk mempertahankan statusnya atau berusaha untuk meningkatkan statusnya, yaitu dengan cara memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya dan memperoleh pekerjaan dari hasil pendidikannya; kedua adalah dengan cara menciptakan usaha atau berwiraswasta; dan yang ketiga adalah merantau alias migrasi untuk mencari kekayaan harta yang sebanyak-banyaknya, seperti yang dilakukan oleh Andi Nazaruddin (peserta FGD 4 Maret 2018).

Langkah dan solusi itu ditempuh karena mereka takut status dan perannya tergantikan oleh golongan *tosama/tomaradeka*. Sementara golongan *tomaradeka* dan golongan *ata/joa* juga telah berusaha meningkatkan statusnya. Mereka juga melakukan migrasi, termasuk ikut transmigrasi lokal yang pernah dilakukan pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Transmigrasi lokal yang dimaksud ini adalah transmigrasi yang terjadi antarkabupaten dalam satu provinsi, misalnya pada tahun 1970-an transmigrasi lokal dilakukan di Sulawesi Selatan dari Kabupaten Toraja ke Mangkutana dan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, yang dulu masih bagian dari Kabupaten Luwu (Eka Candra, wawancara 03 Februari 2018). Adapun tahun 1980-an, juga pernah dilakukan transmigrasi lokal di Sulawesi Selatan dari Kabupaten Jeneponto ke Mamuju Tengah dan Utara. Sementara golongan bangsawan di Sulawesi Selatan tidak mengikuti transmigrasi karena hal itu dianggap aib atau memalukan. Golongan

bangsawan lebih banyak melakukan migrasi swakarsa lokal dan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970-an, sebagaimana yang terjadi di Mangkutan dan Tomoni (Hasil olahan data Focus Groep Discussion/ FGD, Minggu 04 Maret 2018).

### **Polemik Pelaksanaan Kolonisasi dan Transmigrasi**

Kolonisasi dan transmigrasi memiliki persamaan dan perbedaan; persamaannya masing-masing memiliki upaya dan usaha dari pihak pemerintah untuk memindahkan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya. Sementara perbedaannya terletak pada tujuan pemindahan penduduk tersebut, apakah betul-betul bertujuan untuk pemerataan penduduk atau memiliki maksud dan tujuan politis. Kebijakan pelaksanaan kolonisasi, penyelenggaranya adalah pemerintah Hindia Belanda (dalam hal ini negara penjajah, yaitu Belanda). Adapun transmigrasi penyelenggaranya adalah Pemerintah Republik Indonesia. Perbedaannya dapat dilihat melalui jejak sejarahnya, sebab tanpa memahami sejarahnya, perbedaan tujuan itu sulit ditemukan karena sama-sama merasa benar memindahkan penduduk dari wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya.

Kebijakan pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya pada masa Hindia Belanda disebut dengan istilah kolonisasi. Sementara, istilah kolonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kolonisasi adalah tempat perpindahan penduduk di daerah koloni. Koloni adalah daerah penempatan penduduk atau penguasaan yang dilakukan oleh penjajah. Sementara, kebijakan kolonisasi yang terjadi di dunia kebanyakan bermotif ekonomi, artinya bahwa kolonisasi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan motif

ekonomi, jauh dari pengertian dan pemahaman pemerataan penduduk. Akibatnya, menurut hemat saya bahwa kolonisasi pada masa Hindia Belanda memang bukan bertujuan untuk pemerataan penduduk semata, melainkan lebih kepada pengerahan tenaga kerja. Pengerahan tenaga kerja memang dibutuhkan oleh Belanda, karena di wilayah itu ada perusahaan-perusahaan perkebunan atau ada rencana pembukaan perusahaan-perusahaan perkebunan yang memerlukan tenaga kerja (Sjamsu, 1959: 62).

Kolonisasi dengan motif ekonomi memang sulit ditepis jika mengacu pada situasi dan kondisi Belanda sebagai penjajah dan Indonesia sebagai negara terjajah. Walaupun dalam kenyataannya ada situasi dan kondisi yang memperkecil pandangan negatif itu, yaitu kondisi demografi Indonesia, dimana Pulau Jawa terlalu padat penduduknya, sedang luar Jawa jarang penduduknya. Kenyataan lain yang juga tidak dapat ditepis adalah situasi politik dunia pada masa itu. Belanda mendapat kritikan dunia luar sebagai negara penjajah yang kurang mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan negara koloninya. Kritikan itulah yang menginspirasi van Deventer untuk mengoreksi kebijakan van de Bosh yang kemudian melahirkan “Politik Etis” dengan tiga sasaran pokok yang diajukan oleh van Deventer, yaitu pendidikan; irigasi dan emigrasi sebagai politik balas budi (Yudohusodo. 1997: 4). Kepadatan penduduk Pulau Jawa, Madura, dan Bali berdasarkan data statistik tahun 1983 menyebutkan 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dan luasnya wilayah yang dimanfaatkan hanya 7% dari luas wilayah Indonesia. Kepadatan penduduk Pulau Jawa sekitar 700 jiwa per km<sup>2</sup>. Adapun di luar Pulau Jawa hanya sekitar 30 jiwa per km<sup>2</sup> hasil sensus 1983 (Ismawan, 1985: 129).

Data demografi sejak awal abad XIX menjadi dasar acuan lahirnya kebijakan pemerataan penduduk Indonesia

melalui kolonisasi dan diteruskan oleh pemerintah Indonesia melalui transmigrasi. Tetapi itu tidak lepas dari kritikan yang mengatakan bahwa kebijakan kolonisasi dengan pemindahan penduduk Jawa ke luar Jawa dianggap terlalu dini dan berlebihan, itu hanya sebagai bentuk kecemasan demografi, bahkan dianggap bahwa pertumbuhan yang sangat besar itu tidaklah sepenuhnya benar (Edi Swasono, 1985: 72-75). Kelebihan penduduk pada akhir abad XIX dan awal abad XX dianggap terlalu pagi untuk didengung-dengungkan, dan itu hanyalah berdasarkan persepsi kecemasan saja, dengan kata lain hanya merupakan mitos belaka. Namun, kecemasan ini, kemudian berkembang menjadi keyakinan yang berlebihan, karena penyelesaian dari kepadatan atau kelebihan penduduk Jawa hanyalah melalui pemindahan penduduk besar-besaran keluar Pulau Jawa. Padahal kalau masa kolonial, itu hanya sarana penyediaan buruh murah bagi pengembangan perusahaan-perusahaan kapitalis Belanda dan asing (Edi Swasono, 1985: 75-76).

Dasar pemikiran kolonisasi dengan alasan keadaan jumlah penduduk yang semakin meningkat di Pulau Jawa merupakan alasan yang paling tepat. Tetapi kenyataan lain adalah adanya kebutuhan buruh di *onderneming-onderneming* di luar Jawa. Oleh sebab itu, politik kolonisasi diarahkan kepada pemenuhan akan kebutuhan buruh yang murah atas perusahaan-perusahaan itu. Penduduk yang dipindahkan harus tetap dalam keadaan ekonomis lemah (miskin) di daerah baru, supaya mereka tetap merupakan calon-calon buruh yang murah bagi perusahaan-perusahaan asing yang ada di daerah tersebut (Sjamsu, 1959: 62-65). Tujuan Belanda tersebut merupakan bagian dari kebijakan umum pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Pada awal abad XIX, tepatnya tahun 1901 ketika Ratu Belanda menyampaikan pidatonya dalam parlemen Belanda, Ratu Belanda membuat kebijakan untuk daerah jajahan

Hindia Belanda yang melahirkan “Politik Etis”. Politik etis dari segi pemaknaannya sungguh sangat mulia karena politik ini dianggap sebagai politik balas budi.

Namun sebagai negara penjajah tetaplah penjajah. Dalam beberapa penjelasan yang dilakukan oleh Suhartono dalam bukunya mengenai pergerakan nasional (baca Suhartono. 1994). Ia menjelaskan bahwa walaupun kebijakan itu terlihat baik dan menguntungkan kaum pribumi tetapi dalam kenyataannya kebijakan tersebut lebih menguntungkan negara induk baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan politik etis Belanda di Indonesia tetap menyelipkan program yang bernilai tinggi bagi kepentingan Belanda. Pernyataan inilah yang cocok diberikan kepada Belanda pada masa itu, terkait dengan pelaksanaan kebijakan politik etis atau politik balas budi. Tiga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Belanda untuk Indonesia memang kelihatan demi kemajuan Indonesia. Tetapi pada kenyataannya dibalik kebijakan itu terselip tujuan yang sesungguhnya. Misalnya kebijakan masalah pendidikan, bahwa memang Indonesia mulai diberi pendidikan formal pada masa itu. Tetapi terselip tujuan unggulan Belanda. Di mana pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda kekurangan pegawai dalam berbagai bidang di seluruh level pemerintahan dan perusahaan di Indonesia. Untuk menutupi itu semua diperlukan pegawai yang sangat banyak. Dari pada mendatangkan tenaga dari Belanda yang begitu mahal, lebih baik orang pribumi saja yang dimanfaatkan. Untuk itu, mereka harus diberi pendidikan agar bisa membaca, menulis, dan berhitung, didirikanlah sekolah bagi penduduk pribumi Indonesia.

Belanda di Indonesia tidak hanya membangun pendidikan tetapi juga membangun irigasi atau pengairan. Dilihat dari tujuan dan manfaat dari pembangunan irigasi maka pembangunan

itu sangat cocok dan relevan dengan kondisi alam Indonesia sebagai negara agraris. Tentu pertanian dengan berbagai macam jenis tumbuhan dan tanamannya memerlukan pengairan yang teratur untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Tujuan irigasi itu tentu sangat menggembirakan bagi orang-orang pribumi seandainya kita tidak dalam keadaan terjajah oleh Belanda atau bangsa lain. Sementara tujuan Belanda sebagai negara penjajah adalah memonopoli komoditi perdagangan.

Sama halnya dengan dua bidang program politik etis, yaitu pendidikan dan irigasi, emigrasi pun demikian, memiliki tujuan mulia yakni untuk pemerataan penduduk Indonesia. Dalam kalimat lain bahwa pembangunan dapat merata bagi seluruh Indonesia. Namun, kenyataan lain bahwa wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali juga memiliki tanah yang subur dan bisa menghasilkan komoditi yang laku baik di pasar lokal maupun dunia, sehingga perlu ditingkatkan produktifitasnya. Sementara Pulau Jawa memiliki penduduk yang sangat padat pada masa itu, akibatnya menjadi alasan pemerintah Hindia Belanda untuk dipindahkan sebagian ke wilayah lain yang kurang penduduknya. Salah satu sasaran penempatan penduduk Pulau Jawa dan Bali adalah Pulau Sulawesi, termasuk di dalamnya Luwu, Polewali Mandar. Akibatnya, sulit dilepaskan kolonisasi dari bermotif ekonomi.

Eksplotasi agraris yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda menuntut adanya hegemoni secara mutlak wilayah kolonisasi seperti Mangkutana dan Tomoni, Sulawesi Selatan. Eksplotasi agraris tentu sasarannya adalah hasil pertanian yang dapat membawa keuntungan, sebab hasilnya yang akan dijadikan komoditi dagang. Sehingga aktualisasi dari kebijakan itu adalah migrasi yang dianggap paling tepat, dimana dilakukan penyebaran penduduk dengan menjadikan Pulau Jawa dan Bali sebagai kolonis yang akan dikirim ke

daerah-daerah yang dianggap kosong agar dapat mengolah tanah pertanian dan dapat meningkatkan hasil produksi. Jadi, kolonisasi dilakukan untuk kepentingan negara penjajah (Belanda) dan tentu berbeda dengan transmigrasi karena pelaksanaannya bukan lagi pemerintah penjajah melainkan pemerintah Republik Indonesia.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transmigrasi adalah program pemerintah pusat Republik Indonesia. Tujuannya adalah pemerataan penduduk antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Jawa, pemerataan pembangunan dan pemerataan tenaga kerja. Apalagi jika merujuk pada UU No.3 Thn 1972 Tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi. Tujuan utamanya tidak semata-mata untuk mencapai penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan merata tetapi juga, untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek yang dipandang perlu, agar tercapai peningkatan produktifitas nasional (Lihat penjelasan UU No.3 Thn 1972 Tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi).

Migrasi, khususnya migrasi yang terkait dengan kolonisasi pada masa kolonial dan transmigrasi setelah kemerdekaan selalu mendapat kritikan. Hal ini karena pengembangan sumber daya manusia pada saat itu tidak cukup berhasil karena dalam kenyataannya, mereka yang tidak mempunyai produktifitas yang relatif tinggi, sama pada waktu mereka masih di daerah asalnya (Tjiptoherijanto, 1985: 271). Akibatnya, kalau diperhatikan, bahwa sesungguhnya tingkat kesejahteraan para migrasi (kolonisasi dan transmigrasi) setelah kemerdekaan dibandingkan dengan sebelum kemerdekaan tidak terlalu banyak perbedaan, kecuali perbedaan faktor pendorongnya. Kolonisasi dan transmigrasi lebih banyak bergerak dalam bidang pertanian konsumtif daripada pertanian komoditas. Hal inilah yang menyebabkan lambatnya perkembangan di daerah kolonisasi dan transmigrasi. Baru mengalami kemajuan pesat pada waktu orang-orang pedagang datang ke daerah ini

(Zulkarnain, wawancara dan *Focus Groep Discussion/FGD*, 04 Maret 2018). Ada juga migrasi yang berperan penting di Mangkutana dan Tomoni sejak tahun 1970-an, yaitu migrasi swakarsa. Namun, ada juga gejala lain dalam proses migrasi, seperti transmigrasi masyarakat Sulawesi Selatan ke berbagai nusantara, khususnya ke Kalimantan pada tahun 1950-an karena dipicu oleh adanya kekacauan, yaitu adanya gerakan DI/TII. Transmigrasi ini lebih banyak disebabkan masalah perjuangan, keamanan, dan tekanan psikologis.

Kasus migrasi pada masa DI/TII hampir sama dengan kasus pada abad XVII, dimana Sulawesi Selatan sudah dikuasai penuh oleh Kolonial, dan juga telah diikat dengan Perjanjian Bungaya. Akibatnya, tidak memungkinkan lagi mereka melakukan perlawanan/perjuangan di daerah ini. Sementara pascakemerdekaan lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi, terkecuali pada masa DI/TII yang juga lebih banyak beralasan keamanan. Pasca kemerdekaan menyisahkan luka dalam, penderitaan, dan kemiskinan yang luar biasa. Secara kultural Sulawesi Selatan mengisyaratkan pentingnya memperjuangkan harga diri dari keterpurukan, dimana harus bangkit dan menunjukkan eksistensinya. Salah satu cara untuk menunjukkan itu adalah meninggalkan kampung halaman dan mencari daerah yang dapat mengangkat diri dari keterpurukan pascaperang.

Perkembangan dan peningkatan migrasi orang-orang Sulawesi Selatan ke nusantara terus berlanjut hingga sekarang. Walaupun jumlah dan volumenya tidak sebanding dengan migrasi orang-orang Jawa di nusantara. Migrasi orang Jawa di nusantara terhitung sangat besar karena peningkatan demografi dan kondisi ekonomi mereka, khususnya bagi mereka yang secara sengaja dikolonisasikan dan ditransmigrasikan (Nadiman, wawancara, 04 Januari 2018). Namun pada sisi lain sejak abad XIX, Jawa mengalami peningkatan ekonomi yang luar biasa

dibandingkan dengan luar Jawa, tetapi kalau dilihat pemertaannya terjadi ketimpangan karena persoalan demografi yang sangat tinggi dan padat itu. Demikian juga persoalan luas tanah pertanian di Jawa semakin menyempit karena adanya alih fungsi lahan, dan pengembangan industri yang sangat cepat. Hal itu berbanding terbalik dengan jumlah penduduk dan luas lahan di luar Pulau Jawa. Data menyebutkan bahwa saat ini dari total jumlah penduduk Indonesia, sekitar 60% penduduknya tinggal di Pulau Jawa dari jumlah penduduk Indonesia yang hanya menempati 7% dari luas wilayah Indonesia (Yudohusodo. 1997: 12). Kalau kita menengok kebelakang lagi, khusus hasil sensus tahun 1952, juga menyebutkan tingkat kepadatan penduduk di Jawa mencapai 391 jiwa per km<sup>2</sup>, sementara di luar Jawa hanya sekitar 20 jiwa per km<sup>2</sup> (Sjamsu, 1959: 01).

### **Tomoni sebagai Wilayah Penempatan Kolonisasi dan Transmigrasi**

Terkait dengan nama Tomoni dan toponiminya, kita tidak menemukan data tertulis secara resmi dan valid. Kita hanya menemukan pendapat dari sumber lisan bahwa Tomoni tidak memiliki arti khusus, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Pamona. Pamona yang dianggap kelompok komunitas pewaris dan bahkan disebut etnis yang mendiami pertama-tama Kecamatan Mangkutana dan Tomoni. Termasuk tidak ditemukan dalam bahasa atau dialek Luwu sebagai wilayah Kerajaan Luwu pada masa lampau (Olahan data hasil FGD, 4 Maret 2018). Juga tidak ditemukan dalam kosakata bahasa Jawa karena Kecamatan Tomoni sekarang didiami oleh etnis Jawa yang mencapai 65% dari keseluruhan penduduk yang ada di Kecamatan Tomoni, bahkan ada beberapa desa di kecamatan ini yang penduduknya mencapai 90% adalah etnis Jawa (Kasirun, wawancara, 05 Maret 2018). Bahasa Bugis dan Makassar juga tidak ditemukan kosakata “tomoni”, namun ada beberapa informan yang

memberikan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kata tomoni yang mengatakan bahwa tomoni berarti tempat yang ramai, ada juga yang mengartikan bahwa tomoni adalah wilayah yang datar, tanah yang subur, dan lain-lain (Olahan data hasil FGD, 4 Maret dan Kasirun, wawancara, 5 Maret 2018).

Menyimak pernyataan lisan dari beberapa informan itu dan menghubungkan data-data sekunder, memang tidak ditemukan penjelasan secara khusus mengenai kata tomoni, baik asal-usulnya kata itu, maupun pengertian dan padanannya. Namun, sehubungan dengan itu, kata tomoni sudah populer digunakan di Luwu sejak masa lampau, walaupun lampainya sendiri tidak ditemukan angka tahunnya kapan mulai digunakan. Tetapi dari beberapa informan berpendapat bahwa kata Tomoni diambil dari nama sungai yang ada di wilayah itu, yaitu di Mangkutana, tetapi kita tidak begitu tahu pengertian yang sebenarnya, sama dengan pengertian Mangkutana, juga tidak ditemukan arti sebenarnya, tetapi dengan nama Sungai Tomoni dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa Kecamatan Tomoni diadopsi dari nama sungai itu. Tentu memiliki alasan, kenapa nama sungai yang diadopsi menjadi nama wilayah dan akhirnya menjadi nama kecamatan. Jika kita membuka jejak-jejak sejarah sungai itu, sungai itu patut diabadikan dan diadopsi menjadi kecamatan karena sungai itu memiliki andil yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan pertanian di wilayah itu, khususnya di Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Mangkutana (Olahan data hasil FGD, 4 Maret 2018).

Sungai Tomoni menurut beberapa sumber lisan mengatakan bahwa sungai itu sudah ada pada masa kerajaan, mereka sendiri (para informan/narasumber) mengakui bahwa sungai itu sudah ada sejak nenek moyang mereka tinggal di wilayah itu. Artinya bahwa sungai itu sudah sangat tua karena orang-orang yang tinggal di wilayah sekitarnya menganggap

sudah sangat tua. Sungai Tomoni ini sering disandingkan dengan Sungai Kalaena, yang juga sangat tua, tetapi Sungai Kalaena ini lebih besar dan lebih panjang dari Sungai Tomoni (Olahan data hasil FGD, 4 Maret 2018).

Sungai Tomoni dan Sungai Kalaena memang tercatat dalam sejarah kolonial, khususnya masa Hindia Belanda. Lebih terkhusus lagi pada saat lembah atau Sungai Tomoni dan Lembah Kalaena dijadikan wilayah penempatan kolonisasi pada tahun 1937, dan penempatan transmigrasi sejak 1975. Dalam perkembangannya memang dua sungai ini menjadi urat nadi perekonomian Kecamatan Mangkutana. Kemudian Kecamatan Mangkutana dimekarkan menjadi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tomoni, Tomoni Timur, Kalaena, dan Kecamatan Mangkutana sendiri. Perkembangan pesat terjadi di wilayah ini karena andil dari sistem pertanian yang berkembang dan maju, atas dukungan pengairan dari dua sungai tersebut. Namun, dari empat kecamatan tersebut, Kecamatan Tomoni yang memiliki perkembangan dan kemajuan yang lebih pesat sampai saat ini (Olahan data hasil FGD, 4 Maret 2018).

Namun yang perlu juga dijelaskan adalah proses kedatangan atau proses penempatan kolonisasi dan transmigrasi di Tomoni dan Mangkutana. Para kolonis dan para transmigran sebagai salah satu faktor yang memberi andil perubahan Tomoni dan Mangkutana. Merekalah yang dapat mengubah Kecamatan Tomoni dari wilayah hutan yang tidak bertuan menjadi pusat perekonomian Kabupaten Luwu Timur. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa Mangkutana pada masa lampau, khususnya wilayah lembah Kalaena dan sekitar Sungai Tomoni dijadikan pusat penempatan kolonisasi oleh Pemerintah Hindia Belanda di Luwu Timur.

Pemilihan penempatan kolonisasi di Kalaena dan Tomoni oleh pemerintah Kolonial tentu memiliki pertimbangan dan

alasan-alasan tertentu. Penjelasan di atas dihasilkan lewat *focus group discussion* (FGD) dan hasil wawancara beberapa informan, dapat dirumuskan beberapa alasan penempatan kolonisasi dan transmigrasi di Mangkutana dan Tomoni. Pertama, bahwa Mangkutana dan Tomoni pada waktu penempatan kolonisasi belum memiliki penduduk yang banyak; kedua, Mangkutana dan Tomoni masih hutan belantara yang memungkinkan pembukaan lahan pertanian tanpa mengancam ekosistem dan habitat lainnya; ketiga, tanahnya diyakini subur dan didukung oleh adanya pengairan Kalaena dan Sungai Tomoni; keempat adalah terkait dengan sosial budaya orang Bugis-Makassar yang terbuka dan mau menerima orang atau etnis lain dengan konsep *mare liberum* (laut bebas), dan alasan-alasan lainnya.

Terkait dengan itu, penempatan kolonisasi di Sulawesi, termasuk Kalaena (Tomoni di dalamnya) telah dirancang oleh pemerintah Hindia Belanda jauh sebelum penempatan. Pada April 1937, pemerintah Hindia Belanda menyusun dan mendaftar daerah yang mungkin akan dijadikan sebagai daerah kolonisasi bagi orang Jawa di Sulawesi. Berdasarkan Laporan Asisten *Residence*, dipilihlah daerah Paria atau Bungi; Mapili; Muna; Tamuku; Kalaena; dan Tomoni atau Malili; Lamasi di daerah Palopo (Sjamsu, 1959: 62). Khusus untuk Luwu, Sulawesi Selatan adalah Kalaena dan Lamasi dekat Kota Palopo. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, penempatan kolonisasi dan transmigrasi di Luwu semakin meluas.

Selanjutnya daerah itu dinilai oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai wilayah yang sangat layak untuk dijadikan wilayah penempatan kolonisasi karena memungkinkan pembuatan irigasi. Itulah sebabnya pada awal tahun 1937 dimulai persiapan penempatan kolonisasi pertama. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dipilihnya Mangkutana dan Tomoni, di samping empat alasan di atas, juga ada alasan politis pemerintah Hindia

Belanda. Pemerintah Hindia Belanda, khususnya perusahaan milik Belanda yang bergerak dalam bidang perkebunan yang sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan murah. Di Sulawesi Selatan juga didirikan perusahaan perkebunan, baik yang sudah ada maupun yang akan diusahakan, dan itu memerlukan banyak tenaga kerja. Sementara para kolonis dipilih dari Jawa karena di Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, banyak pengangguran dan rawan keamanan (Djojoprapto. 1997: 52). Empat alasan di atas sebagai konsekuensi logis dari adanya keinginan untuk memanfaatkan tenaga kolonis dalam perusahaan perkebunan nantinya. Namun, untuk memberinya gaji yang tinggi, kemungkinan perusahaan akan berpikir dua kali, diberilah lahan yang subur untuk menghindari adanya protes yang berlebihan.

Pemilihan Sulawesi sebagai salah satu wilayah penempatan kolonisasi sudah menjadi agenda pemerintah Hindia Belanda. Alasannya bukan hanya karena Sulawesi Selatan jarang penduduknya, melainkan juga sebagian besar tanahnya subur. Selain itu karena Sulawesi Selatan juga memiliki perusahaan perkebunan karet yang ada di Luwu dan Bulukumba sebagai perusahaan swasta Eropa yang memerlukan buruh. Tidak kalah pentingnya adalah persoalan kultural dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat menghargai dan menghormati tamu (migrasi). Akibatnya, praktis sejak penempatan kolonisasi sejak 1937, transmigrasi sejak 1975 sampai saat ini tidak ada gesekan dan konflik-konflik yang terjadi antara penduduk asli Sulawesi Selatan dengan para kolonis dan transmigran yang dapat merusak hubungan antara keduanya. Disamping itu, orang Sulawesi Selatan juga adalah perantau (Zulkarnain, wawancara, 04 Maret 2018).

Walaupun memang pada awalnya pelaksanaan kolonisasi dan transmigrasi lebih banyak diarahkan ke wilayah bagian barat Indonesia, khususnya bagian

Sumatera tetapi dalam perkembangan tanahnya semakin menyempit untuk dijadikan lahan pertanian. Akibatnya, perkembangan penempatan kolonisasi berikutnya diarahkan ke Indonesia bagian timur, khususnya di Sulawesi Selatan, bahkan jauh ke timur lagi. Penempatan transmigrasi juga banyak dialihkan ke Indonesia bagian timur seperti Irian Jaya (dulu) dan sekarang bernama Papua. Sebenarnya pelaksanaan transmigrasi di Irian Jaya sudah dilakukan sejak pra-Pelita tahun 1964 berjumlah 267 KK, dan dilanjutkan pada pelita-pelita berikutnya (Soetrisno, 1985: 118-119). Sementara di Sulawesi sendiri, sebenarnya sudah dirancang sejak 1906 penyelenggaraan kolonisasi. Tetapi pelaksanaan itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penempatan kolonisasi yang dilakukan sebelumnya, khususnya di Lampung dianggap tidak memberikan manfaat yang cukup berarti. (Sjamsu. 1985: 62).

Pada tahun 1919 terjadi lagi surat menyurat antara Gubernur Sulawesi dengan pemerintah pusat mengenai kolonisasi di Sulawesi, dan sepakat membuka kolonisasi di Palopo, dan Masamba berdasarkan surat pada bulan Oktober 1919 karena di daerah itu telah ada beberapa *onderneming* dan akan berdiri lagi beberapa *onderneming* besar bangsa Eropa, yang banyak mempergunakan buruh (Sjamsu. 1985: 62-63). Namun, pengiriman kolonisasi ke Sulawesi secara berencana, baru dilakukan pada tahun 1937 karena tahun-tahun sebelumnya mengalami kegagalan kolonisasi di Lampung, termasuk karena alasan keuangan. Sampai tahun 1941 telah ada enam kolonisasi yang agak besar di Sulawesi sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu Paria atau Bungi; Mapili; Muna; Tamuku; Kalaena atau Malili; dan Lamasi di daerah Palopo.

Paria: penempatan kolonisasi di daerah Paria ini menjadi bukti keseriusan pihak pemerintah untuk mengerahkan tenaga kerja ke Sulawesi. Kolonisasi di

Paria ini ditempatkan di daerah Sawitto dan Batulappa. Namun, sedikit memiliki kendala karena wilayah ini sudah berpenghuni. Akibatnya, harus dilakukan negoisasi, terutama pemimpin kelompok mereka harus didekati. Setelah melalui pendekatan, terutama mereka yang berpenduduk asli, seperti Bugis dan Toraja berhasil didekati. Barulah ditempati oleh para kolonis, kemudian daerah penempatan diberi nama Sidomulyo dengan luas sekitar 3500 ha, dari 147 keluarga (469 jiwa). Setiap kepala keluarga diberi 1 ha tanah sawah dan 1/5 ha (40 x 50 m) pekarangan, diberi pinjaman berupa atap, paku, dan hewan (Sjamsu. 1985: 63-65).

Tamuku: terletak di daerah Masamba dekat Bone-Bone dibuka pada tahun 1938 sebanyak 487 keluarga (1569 jiwa), tahun 1939 didatangkan lagi sebanyak 4623 jiwa; Kalaena: baru didirikan pada tahun 1937-1938 yang disebut kolonisasi Malili, sekitar 477 keluarga (1553 jiwa) dari Jawa; Lamasi: Baru didirikan pada tahun 1940 di daerah Palopo sekitar 249 keluarga. Mangkutana dan Tomoni adalah bagian dari Kalaena, sehingga benar sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa yang disebut dalam data kolonial adalah Lembah Kalaena dan Sungai Tomoni. Tentu pemilihan Lembah Kalaena dan sekitarnya, termasuk Tomoni karena sudah dipertimbangkan dengan baik-baik oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa penempatan kolonisasi di Indonesia (Hindia Belanda) bukan semata-mata untuk kepentingan kepadatan penduduk Pulau Jawa. Tetapi juga alasan tenaga kerja karena Pemerintah Hindia Belanda setelah ekspedisi militer 1904-1907, dapat dikatakan Indonesia secara keseluruhan sudah dikuasai secara politik. Penguasaan ini membuka jalan dan memberi peluang bagi pihak swasta untuk membuka lahan perkebunan komersial yang dikenal dengan *onderneming*. Di Sulawesi sendiri dibuka *onderneming*, khususnya perkebunan karet di daerah Luwu dan

Bulukumba. Perkebunan yang ada di Bulukumba masih bertahan sampai sekarang dengan nama “Lonsum” (London Sumatera). Itulah sebabnya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dijadikan lokasi penempatan kolonisasi.

Daerah penempatan kolonisasi pertama di Indonesia adalah Gedong Taatang Lampung, yang diikuti oleh Kepayiyang di Bengkulu (1909), Mata Lintang, Palembang (1919), Wanoso, Lampung (1927), Sukadana, Lampung (1932), Tugumulyo, dan Belitang di Palembang (1937), Tabir, Jambi (1940), dan Batahan, Sumatera Barat (1941), Barabai, Kalimantan Selatan (1920/1921), Kercak Hanyar dan Pangarong, Kalimantan Selatan (1938), Jambayang, Kalimantan Timur (1938), Sungai Lauk, Purwosari, Kalimantan Selatan (1939). Sedangkan di Sulawesi meliputi Bungi dengan kolonisasi Sidomulyo, Teluk Mandar (1937), Mapili (1937), Masamba-Malili dengan daerah koloni Kalaena dan Tamuku (1938), Pulau Muna (1938), Lamasi Palopo pada 1940 (Edi Swasono. 1985: 71). Pengiriman transmigrasi ke Sulawesi mencapai 16.628 kolonis pada akhir tahun 1940 (Tjondronegoro. 1985: 227).

Kembali ke wilayah penempatan di Mangkutana dan Tomoni, khususnya kolonisasi Kalaena merupakan pemilihan wilayah penempatan yang tidak banyak memiliki rintangan dan dianggap berhasil oleh pemerintah Hindia Belanda. Keberhasilan itu dapat dilihat dari beberapa alasan, pertama dari segi lokasi penempatan para kolonisasi di daerah itu, dimana tanahnya terhitung subur dan dilengkapi dengan pengairan alami berupa aliran Sungai Kalaena dan Sungai Tomoni; Kedua lokasi tersebut masih berupa utang belantara yang tidak ter huni oleh penduduk, sehingga tidak memungkinkan terjadinya konflik horisontal antara penduduk asli dengan penduduk pendatang atau para kolonis; ketiga, penduduk yang dianggap penduduk asli di daerah tersebut tergolong sangat sedikit jika dibandingkan

dengan luas wilayah, termasuk jika dibandingkan dengan jumlah pendatang. Penduduk asli yang dimaksud adalah kelompok etnis Pamona. Kelompok ini tidak mempersoalkan kehadiran para kolonis dan itu terbukti sampai saat ini tidak pernah ada kejadian konflik antara kelompok etnis Pamona yang dianggap penduduk asli dengan para kolonis alias pendatang atau migrasi (Zulkarnain, wawancara, 4 Maret 2018).

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan di lokasi penempatan kolonisasi, transmigrasi, dan migrasi swakarsa lokal dan migrasi swakarsa nasional membenarkan bahwa orang Pamona dianggap penduduk asli Mangkutana dan Tomoni. Kemudian salah seorang dari keturunan orang Pamona juga ikut berkomentar dan berpendapat bahwa orang Pamona dikatakan orang pertama masuk di Mangkutana itu dapat dibenarkan menurut orang-orang tuanya dulu. Kemudian disusul oleh orang-orang Jawa sebagai kolonisasi dan transmigrasi, lalu datang juga orang-orang Bugis tetapi mereka bukan kolonisasi atau transmigrasi (Olahan data hasil FGD, dan Jen/keturunan Pamona, wawancara, 4 Maret 2018). Orang-orang Pamona juga mengakui bahwa kelompoknya memang sangat sedikit. Mereka hidup dalam hutan-hutan dan suka berpindah-pindah, tetapi mereka bukanlah orang hutan, cuma tinggal di hutan. Dalam perkembangannya, orang-orang Pamona hidup menetap dan berkembang biak, tetapi sampai sekarang masih terhitung sangat sedikit jumlahnya. Banyak diantara mereka menjual tanahnya dan pindah ke tempat lain, khususnya ke Poso (Kasirun, wawancara, 05 Maret 2018). Sementara pada saat pembukaan lahan-lahan pertanian pada waktu penempatan kolonisasi awal, masih ada kebebasan menempati dan mengelola tanah yang belum ada yang memilikinya. Siapa yang kuat dan rajin, dialah memiliki tanah yang luas (Jen, wawancara, 04 Maret 2018).

## PENUTUP

Tomoni sebagai salah satu wilayah penempatan migrasi di Sulawesi Selatan. Sepanjang dan sebatas data yang diperoleh di lokasi menunjukkan terjadinya dinamika yang cukup tinggi dan cepat, baik dilihat dari sudut integrasi sosial maupun perkembangannya dalam berbagai bidang. Juga yang dapat dicatat, bahwa migrasi di sana tidak ada konflik-konflik yang membahayakan, tetapi harus mendapat perhatian yang serius kepada semua pihak. Adanya keadaan yang kondusif di Tomoni Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan juga memiliki tradisi migrasi di berbagai daerah nusantara. Migrasi orang Sulawesi Selatan ini menyebar ke seluruh Nusantara, ada yang ke Jawa pada pasca Perang Makassar membantu perjuangan Trunojoyo yang ada di Madura, Jawa Timur, termasuk ke Kerajaan Mataram. Ada yang ke Sumantera, ke Kalimantan, ke Nusa Tenggara dan juga ke Papua dengan berbagai alasan. Penyebaran atau migrasi orang-orang Sulawesi Selatan dianggap migrasi yang ideal karena merata di seluruh Nusantara.

Walaupun memang pelaksanaan migrasi, khususnya kolonisasi dan transmigrasi mengalami polemik dan menuai banyak kritikan. Termasuk kritikan terhadap pelaksanaan kolonisasi pada masa Hindia Belanda yang dianggap sebagai kebijakan untuk pemeratakan penduduk di wilayah Indonesia, padahal bermotif ekonomi dan penyediaan tenaga buruh perkebunan. Tetapi harus diakui bahwa kepadatan penduduk Pulau Jawa, Madura, dan Bali berdasarkan data statistik tahun 1950-an, termasuk data tahun 1983 menyebutkan 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dan hanya menempati 7% dari luas wilayah Indonesia. Kepadatan penduduk Pulau Jawa sekitar 700 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan di luar Pulau Jawa hanya sekitar 30 jiwa per km<sup>2</sup> hasil sensus 1983.

Belanda sebagai negara penjajah pada masa itu, tentu memikirkan kepentingan negaranya. Walaupun dalam

mewujudkan kepentingan negaranya, dianggap wajar jika berimbas kepada negara terjajah (Indonesia). Pada masa itu di Indonesia telah banyak perusahaan-perusahaan Eropa, khususnya perusahaan-perusahaan perkebunan. Akibatnya, kebutuhan buruh *onderneming-onderneming* di luar Jawa memang sangat besar. Kolonisasi adalah salah jalan keluar untuk memperoleh tenaga buruh yang banyak dan murah. Orang-orang yang dikolonisasi bukan orang-orang yang memiliki nilai transpormasi budaya bertani maupun produktifitas yang tinggi. Tujuannya adalah supaya mereka tetap merupakan calon-calon buruh yang murah bagi perusahaan-perusahaan asing yang ada di daerah tersebut. Akibatnya, besar dugaan bahwa kolonisasi pada masa itu hanya sarana penyediaan buruh murah bagi pengembangan perusahaan-perusahaan kapitalis Belanda dan asing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dkk. (editor). 1985. *Ilmu sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia
- Djojoprapto, Tarsi. 1997. Perkembangan Penyelenggaraan Transmigrasi, dalam Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad (ed). 1997. *90 Tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi: Redistribusi Penduduk di Indonesia*, Jakarta, Puspa Swara bekerja sama dengan Departemen Transmigrasi dan PPH
- Edi Swasono, H.J. Sri. 1985. "Kependudukan, Kolonisasi dan Transmigrasi", Dalam: *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, edisi baru, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, yang diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto.

- Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Harjhono, Joan, 1982. *Tranmigrasi Dari Kolonisasi sampai swakarsa*, Jakarta: Gramedia
- Heeren, H.J. 1979. *Transmigrasi di Indonesia: Hubungan Antara Transmigran dan Penduduk Asli, dengan Titik Berat Sumatera Selatan dan Tengah*, Jakarta: PT. Gramedia
- Ismawan, Bambang. 1985. "Pengembangan Swadaya Masyarakat Transmigran", Dalam: *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, edisi baru, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Kartodirdjo, Sartono. 1985. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia
- \_\_\_\_\_, 1988. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, jilid I PT. Jakarta: Gramedia
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana dan Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*, Makassar, diterbitkan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan bekerja sama dengan "Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sulawesi Selatan
- Soetrisno, Loekman. 1985. "Peranan Transmigrasi dalam Stabilitas Sosial Politik Daerah Perbatasan dan Problematikannya Kasus Irian Jaya", Dalam: *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, edisi baru, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Sjaman, M Amral. 1959. *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi*, Jakarta: Djambatan
- Sjamsu, M. Amral. 1985. "Transmigrasi: Gagal Ataukah Berhasil", Dalam: *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, edisi baru, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1985. "Beberapa Tolok-Ukur Keberhasilan Program Transmigrasi: Suatu Gagasan", Dalam: *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, edisi baru, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 1985. "Migrasi Berencana: Tolok Ukur Keberhasilan dan Misi Departemen di Masa Depan", Dalam: *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, edisi baru, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Utomo, Muhajir dan Rofiq Ahmad. 1997. *90 Tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi: Redistribusi Penduduk di Indonesia*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
- Warsito, Rukmadi, dkk. 1984. *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, Jakarta: CV. Rajawali
- Yudohusodo. Siswono. 1997. Refleksi Sejarah dan Arah Kebijakan Transmigrasi di

Masa Mendatang, dalam  
Muhajir Utomo dan Rofiq  
Ahmad (ed). 1997. *90 Tahun  
Kolonisasi, 45 Tahun  
Transmigrasi: Redistribusi  
Penduduk di Indonesia*, Jakarta,  
Puspa Swara bekerja sama  
dengan Departemen  
Transmigrasi dan PPH

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  
1995. Jakarta, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia, edisi kedua*,  
Balai Pustaka

**Wawancara dan Focus Groep  
Discussion (FGD)**

1. Focus Groep Discussion 04 Maret 2018
2. Bapak Jen (seorang Kepala Desa), Kecamatan Tomoni, Luwu Timur, Sulawesi Selatan
3. Andi Nazaruddin (seorang Kepala Desa dan keturunan generasi kedua dari transmigrasi swakarsa lokal), Kecamatan Tomoni, Luwu Timur, Sulawesi Selatan
4. Bapak Eka Candra (seorang transmigran lokal)
5. Bapak Zulkarnain (salah seorang staf Kelurahan Tomoni dan sebagai keturunan orang Luwu) Kecamatan Tomoni, Luwu Timur, Sulawesi Selatan
6. Bapak Nadiman (seorang generasi kedua dari kolonisasi pemerintah Hindia Belanda)
7. Bapak Kasirun (salah seorang staf Kecamatan Tomoni, dan sebagai anak generasi kedua dari kolonisasi pemerintah Hindia Belanda).

